

**DISERTASI**

**BUDAYA PARTISIPASI SOSIAL PETANI JAGUNG DI  
KABUPATEN GORONTALO  
(SEBUAH ANALISIS STRUKTURASI)**



**RAHMAT POMALINGGO  
NIM. E02319201**

**PROGRAM DOKTORAL ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

BUDAYA PARTISIPASI SOSIAL PETANI JAGUNG  
DI KABUPATEN GORONTALO  
(SEBUAH ANALISIS STRUKTURASI)

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT A. W. POMALINGO**

**E023192021**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 06 Juli 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,



**Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.**  
Nip. 196112271988111002

Co. Promotor,



**Prof. Dr. Munsir Lampe, MA.**  
Nip. 195612271986121001

Ketua Program Studi  
Antropologi,



**Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.**  
Nip. 196112271988111002

Co. Promotor,



**Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA.**  
Nip. 195112311986091002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
Nip. 196511091991031008

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat melakukan studi dengan baik di Program Doktor (S3) Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Disertasi ini tidak hanya sebatas rangkaian penelitian untuk mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tetapi lebih dari itu, Disertasi ini bertujuan untuk membuka cakrawala pemikiran kritis, tentang pertanian dan secara esensial, mengungkap tentang perwujudan budaya partisipasi petani dalam mendukung ekspor jagung serta interaksi sosial petani di Kabupaten Gorontalo sebagai wujud budaya masyarakat dalam usaha tani pertanian jagung yang masih dipertahankan. Partisipasi petani juga sebagai bagian dari budaya berada pada tingkat optimal, dan semua unsur masyarakat terlibat di dalamnya untuk bekerjasama.

Dalam konteks itu pula, partisipasi terbukti sebagai bagian dari karakteristik atau ciri khas manusia berbudaya. Wujud interaksi dalam sistem social petani jagung sesungguhnya tidak hanya terjadi sebagai hasil perilaku individu-individu yang hanya didasarkan pada perasaan dan bersifat semraut, melainkan diarahkan dan dituntun oleh pemerintah, sistem nilai dan norma budaya petani jagung.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Kepada Prof. Dr. Hamka Naping, MA selaku Direktur Sekolah Pasca Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Kepada Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta stafnya yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ansar Arifin, MS sebagai Promotor, Prof. Dr. Munsil Lampe, MA sebagai Co-Promotor I dan kepada Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA sebagai Co-Promotor II, karena telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat konstruktif dan bermanfaat untuk memahami Antropologi dalam penulisan ini. Dari merekalah saya mengetahui beragam paradigma dan metode untuk masuk dalam setting yang sensitif untuk mengungkap dan menjabarkannya secara komprehensif dalam sebuah karya disertasi.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. M. Yamin Sani (Alm), MS; Prof. Dr. Hamka Naping, MA; Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA; Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D; Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA; Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.Si; Dr. Tasripin Tahara, M.Si; Dr. Yahya, MA; Dr. Lahaji Haedar, M.Ag; dan Dr. Mashadi, M.Si, karena

telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan berlangsung, dan membuka wawasan saya tentang paradigma, metode dan praktek penelitian untuk melihat secara objektif realitas sosial-budaya dalam perspektif antropologi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Mahmud Tang, MA; Dr. Sapriadi, M.Si dan Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si sebagai penguji, yang memberikan tanggapan kritis pada saat ujian berlangsung dan mampu merubah sudut pandang saya tentang antropologi pertanian dan bagaimana fenomena sosial-budaya diketahui dan dieksplanasi secara komprehensif.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada sahabat dan teman seperjuangan di program Doktoral (S3) Antropologi fisip Unhas yaitu Marten Taha, Yowan Tamu, Ade Permana, Rahmat Doni Lahatie, Lukman Kasim, Momi A. Hunowu, Sri Dewi R. Nani, Dewi Yusuf, Cokro Katili, Victor Asiku, Husin Ali, Samsi Pomalingo, Afirin Jakani, Subhan Ashir Dai, Kamarudin Kamaru, Farid Musa, Arfan Nusi, Safwan Tahir Bano, Cokro A. Katili, dan Safaruddin Udin. Dari kalian saya semakin mengenal dan memahami wujud solidaritas dan arti persahabatan yang mendalam.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Bupati Gorontalo

yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama perkuliahan, Camat se-Kabupaten Gorontalo, Lurah Kecamatan Limboto, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Gorontalo, Organisasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kabupaten Gorontalo, Brigadi Alsintan Dinas Peranian Kabupaten Gorontalo, kepada Informan yang di tengah kesibukannya bersedia diwawancarai untuk menemukan data yang akan saya interpretasi dan ekplanasi secara mendalam. Dari kalianlah saya mendapatkan data berharga dan semakin mengajarkanku agar mampu menganalisis, menjustifikasi, menemukan dan mengkonstruksi teori yang relevan tentang problem sosial-budaya pertanian di kabupaten Gorontalo, yang hingga saat ini masih harus diperhatikan dan selesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih yang tulus kepada Ayahanda Abdul Wahab Pomalingo (almarhum) dan Ibunda Hadijah Pido serta saudaraku dan iparku yang tercinta atas segala doa restu, nasehat dan bantuan agar saya selalu sehat dan sukses dalam mengejar cita-cita serta dapat menjadi manusia yang selalu komitmen dengan janji yang telah diikrarkan untuk berguna bagi keluarga dan orang lain.

Ucapan terimakasih yang tulus kepada istriku tercinta Sitti Nur Ain Sompi, anakku tersayang Rizki Praditya Pomalingo, Deswita Pomalingo, Dimas Pomalingo, Mariska Pomalingo, Atalarik Pomalingo. Dari kalianlah saya mengenal cinta kasih yang tulus dan spirit untuk melanjutkan studi di Program Studi Doktoral (S3) Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Gorontalo, 1 Juni 2022

Yang menyatakan,

**Rahmat A.W. Pomalingo**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
B. Budaya Partisipasi Sosial.....	12
C. Teori Solidaritas Sosial .....	22
D. Teori Strukturasi.....	46
E. Motif Berprestasi .....	56
F. Kerangka Konseptual.....	58

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Jenis penelitian .....	62
B. Lokasi Penelitian .....	65
C. Fokus Penelitian .....	65
D. Informan Penelitian .....	66
E. Sumber Data .....	66
F. Teknik Pengumpulan Data .....	67
G. Teknik Analisis Data.....	69
H. Teknik Pengabsahan Data .....	71
I. Definisi Konsep .....	73
J. Jadwal Penelitian .....	74
<b>BAB IV KABUPATEN GORONTALO .....</b>	<b>75</b>
A. Keadaan Geografis .....	75
B. Keadaan Demografis .....	76
C. Visi dan Misi Kabupaten Gorontalo .....	79
D. Keadaan Perekonomian Daerah .....	80
E. Sosial Budaya/Kelembagaan/Pranata Informal/Formal .....	84
F. Pola-pola kepemimpinan.....	88
G. Keadaan Sarana dan Prasarana Daerah .....	95
H. Profil Sosial Budaya Petani Jagung .....	97

## **BAB V BUDAYA PARTISIPASI PETANI DALAM MENINGKATKAN**

### **EKSPOR KOMODITAS JAGUNG ..... 99**

- A. Budaya Partisipasi Petani Jagung..... 100
- B. Bentuk Keterlibatan Petani Dalam Program Pengembangan Jagung ..... 117
  - a. Bergabung dan Terlibat Pada Kelompok Tani..... 118
  - b. Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kelompok Tani ..... 106
  - c. Memberi usulan Dalam Rapat..... 131
  - d. Terlibat Dalam Sekolah Lapangan ..... 136
- C. Frekuensi dan Intensitas Keterlibatan Dalam Program..... 143
  - a. Rutin dan Aktif Dalam Program Sekolah Lapangan ..... 143
  - b. Aktif dalam rapat kelompok tani ..... 146
- D. Upaya Petani Mensukseskan Pengembangan Jagung..... 148
  - a. Menjalankan protokol budidaya Jagung Agropolitan .... 148
  - b. Mendiskusikan Persoalan Lapangan Di dalam rapat.... 151

## **BAB VI STRUKTUR SIGNIFIKASI PEMERINTAH TERHADAP PETANI**

### **DALAM MENINGKATKAN EKSPOR JAGUNG ..... 154**

- A. Bentuk Perhatian Pemerintah Terhadap Petani Jagung... 115
  - 1. Menyediakan Dan Menyalurkan Bantuan Sarana Prasarana ..... 158
  - 2. Menyediakan penyuluh dan jalur pemasaran ..... 167
  - 3. Bekerjasama dengan instansi lain..... 174

4. Bekerjasama dengan Perusahaan Terkait (PT. Pokphand) .....	177
5. Bekerjasama dengan instansi lain (Lembaga Sertifikasi) .....	183
B. Cara Berkomunikasi Pemerintah Terhadap Petani/Kelompok Tani Jagung .....	192
1. Komunikasi Struktural (Pertanian-Poktan) .....	192
2. Komunikasi Personal (Penyuluh-Petani) .....	194

## **BAB VII STRUKTUR DOMINASI PEMERINTAH MENGUATKAN**

### **PARTISIPASI PETANI TERHADAP PENINGKATAN**

#### **EKSPOR JAGUNG ..... 196**

A. Petani wajib mengikuti aturan pemerintah .....	196
B. Pemerintah Mewajibkan Petani Bergabung Kelompok Tani .....	204
C. Penyuluh mengatur dan menentukan kegiatan pertanian .....	214
D. Penyuluh mengintervensi pengetahuan pertanian .....	223
E. Petani wajib melaporkan masalah ke Kelompok Tani .....	232
F. Pemerintah mengatur dan menentukan harga dan subsidi .....	237

## **BAB VIII STRUKTUR LEGITIMASI PEMERINTAH DALAM**

### **MENINGKATKAN EKSPOR KOMODITAS JAGUNG ..... 243**

- A. Penerimaan Petani atas Program Agropolitan..... 243
- B. Petani mematuhi secara sukarela semua syarat-syarat penerimaan bantuan program ..... 256
- C. Petani merespon semua program agropolitan..... 265
- D. Petani menerapkan pengetahuan pertanian dari Penyuluh ..... 274
- E. Petani menerima harga yang ditentukan pemerintah ..... 281
- F. Instansi lain mensukseskan program Agropolitan ..... 288

## **BAB IX PENUTUP..... 291**

- A. Kesimpulan ..... 291
- B. Implikasi Penelitian ..... 293
- C. Rekomendasi..... 294

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber-sumber terbentuknya modal sosial .....	71
Tabel 1.2. Jadwal penelitian .....	74
Table 1.4. Luas tanaman, luas lahan dan jumlah produksi jagung di Kabupaten Gorontalo .....	103
Table 1.4. Produksi jagung dari tahun 2020-2021 .....	104
Tabel 1.5 Jumlah ekspor Jagung 3 tahun terakhir.....	104
Tabel 1.6 Petani terlibat dan bergabung dalam Kelompok tani. ....	124
Tabel 1.7. Petani berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani .....	129
Tabel 1.8. Petani memberi usulan dalam rapat .....	136
Tabel 1.9. Petani terlibat dalam sekolah lapangan .....	142
Tabel 1.10. Frekuensi dan intensitas petani terlibat dalam program .....	148
Tabel 1.11. Pemerintah menyediakan dan menyalurkan bantuan.....	166
Tabel 1.12. Pemerintah menyediakan penyuluh dan jalur .....	173
Tabel 1.13. Bekerjasama dengan instansi lain .....	175
Tabel 1.14. Bekerjasama dengan Perusahaan Terkait.....	184
Tabel 1.15. Bekerjasama dengan instansi lain (balai karantina) .....	191
Tabel 1.16. Petani wajib mengikuti aturan pemerintah .....	203
Tabel 1.17. Pemerintah mewajibkan petani bergabung kelompok tani.....	214

Tabel 1.18. Penyuluh mengatur dan menentukan kegiatan pertanian .....	223
Tabel 1.19. Penyuluh mengintervensi pengetahuan pertanian .....	231
Tabel 1.20. Petani wajib melaporkan masalah ke kelompok tani.....	236
Tabel 1.21. Pemerintah mengatur dan menentukan harga dan subsidi.....	241
Tabel 1.22. Penerimaan petani atas program agropolitan.....	254
Tabel 1.23. Petani mematuhi secara sukarela semua syarat-syarat penerimaan bantuan program .....	263
Tabel 1.24. Petani merespon semua program agropolitan .....	273
Tabel 1.25. Petani menerapkan pengetahuan pertanian dari penyuluh .....	297
Tabel 1.26. Penerimaan petani atas harga yang ditentukan pemerintah.....	287

## DAFTAR BAGAN

1.1 Bagan Alur Dan Kerangka Konseptual .....	61
1.2 Komponen Alur Analisis data .....	71

## ABSTRAK

**RAHMAT A.W. POMALINGO.** *Budaya Partisipasi Sosial Petani Jagung di Kabupaten Gorontalo (Sebuah Analisis Struktural)* (dibimbing oleh Ansar Arifin, Munsil Lampe, dan Pawennari Hijang)

Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis dan menjustifikasi budaya partisipasi petani dalam meningkatkan ekspor komoditas jagung, 2) menganalisis dan menjustifikasi signifikansi pemerintah terhadap petani dalam meningkatkan ekspor jagung di Kabupaten Gorontalo, 3) menganalisis dan menjustifikasi dominasi pemerintah dalam menguatkan partisipasi petani untuk meningkatkan ekspor komoditas jagung, dan 4) menganalisis dan menjustifikasi legitimasi pemerintah dalam meningkatkan ekspor komoditas jagung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan adalah tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dinas terkait, petugas pertanian, petani jagung pengusaha, pengurus dan anggota kelompok petani. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder bersumber dari jurnal dan buku yang diterbitkan secara *online* dan cetak. Analisis data dilakukan dengan cara menyalin data, membaca keseluruhan data, menganalisis secara detail dan mendeskripsikannya secara holistik-integratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat budaya partisipasi petani dalam meningkatkan ekspor komoditas jagung dan mendukung program agropolitan. Selain itu, terdapat struktur signifikansi, dominasi dan legitimasi pemerintah terhadap petani dan mengindikasikan adanya perhatian pemerintah dalam bentuk yang lebih luas kepada petani dalam menguatkan partisipasi petani untuk meningkatkan ekspor komoditas jagung.

Kata kunci: Budaya Partisipasi Sosial, Petani, Signifikansi, Dominasi dan Legitimasi.



## ABSTRACT

**RAHMAT A.W. POMALINGO.** *Social Participation Culture of Corn Farmers in Gorontalo Regency (A Structuration Analysis)* (Supervised by **Ansar Arifin, Mungsi Lampe, and Pawennari Hijjang**)

This study aims to 1) analyze and justify the culture of farmer participation in increasing the export of corn commodities; 2) analyze and justify the government's significance to farmers in increasing corn exports in Gorontalo Regency; 3) analyze and justify the government's dominance in strengthening farmer participation to increase corn exports; 4) analyze and justify the government's legitimacy in increasing the export of corn commodities.

The research used a qualitative method. Informants are community leaders, government officials, related agencies, agricultural officers, corn farmers, entrepreneurs, administrators and members of farmer groups. Primary data were obtained by means of observation, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Secondary Data sourced from journals and books published online and in print. Data analysis was carried out by copying the data, reading the entire data, analyzing them in detail and describing them holistically - integratively.

The results show that there is a culture of farmer participation in increasing the export of corn commodities and strongly supports the agropolitan program. In addition, there is a structure of significance, dominance and legitimacy of the government towards farmers and indicates the government's attention in a broader form to farmers in strengthening farmer participation in increasing exports of corn commodities.

Keywords: social participation culture, farmers, significance, domination and Legitimacy



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan potensi pertanian dan perkebunan yang menjanjikan. Berdasarkan potensi-potensi itulah pemerintah menggenjot pembangunan pertanian melalui modernisasi pertanian dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan secara khusus meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya petani.

Sejarah Indonesia di bidang pertanian bahkan pernah membuktikan terjadinya surplus beras dan bahkan dapat melakukan ekspor pada masa Orde Baru tahun 1980-an sehingga Indonesia dinobatkan sebagai negara swasembada beras yang berarti Indonesia dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri bahkan lebih sehingga dapat menjualnya ke negara lain. Ketika itu, pembangunan pertanian benar-benar menjadi primadona dan para petani benar-benar 'sejahtera'. Hal ini tentu berdampak bagi peningkatan ekonomi bangsa.

Saat Indonesia menjadi jaya di bidang pertanian, keseriusan pemerintah terlihat melalui upaya program modernisasi pertanian yang telah dicanangkan lebih dulu. Meskipun para petani membutuhkan adaptasi tingkat tinggi terhadap berbagai perubahan pola hidup yang merupakan konsekuensi program tersebut tetapi hasilnya tetap menggembirakan kaum tani Indonesia. Dengan demikian, hal tersebut

mengindikasikan adanya keikutsertaan petani dalam program modernisasi tersebut. Jadi para petani menjadi bagian penting sebagai pelaksana. Meskipun negara ini menggunakan sistem pembangunan yang bersifat top-down dan sangat sentralistik, namun negara bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan bangsa dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pergantian pucuk pimpinan negara (presiden) turut berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang berdampak pula pada berbagai program pembangunan bangsa. Setiap presiden berganti, maka kebijakan presiden pun ikut berganti. Sistem pemerintah yang bersifat 'Top-Down' dan telah mendominasi selama puluhan tahun mengalami pergeseran menjadi "Down to Top". Negara bukan lagi kekuatan yang mendominasi negara melainkan masyarakatlah yang menjadi kekuatan. Masyarakatlah yang menentukan sendiri kehidupannya, sedangkan negara hanya memfasilitasinya melalui pembangunan.

Hari ini suasana negara menjadi berbeda. Penerapan sistem otonomi daerah merupakan bukti nyata perubahan tersebut. Otonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini berdampak pada seluruh dimensi kehidupan berbangsa khususnya pembangunan. Kini pembangunan daerah harus bertumpu pada kemampuan sendiri untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD).

PAD tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak, redistribusi dan lain-lain. Di banyak daerah, pertanian masih menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan masyarakat. Pembangunan pertanian membutuhkan keterlibatan petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani mereka. Dengan cara ini petani membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (Bahua, 2010).

Petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian merupakan sumberdaya utama atau subyek utama pelaksanaan pembangunan. Dulu, mereka berposisi sebagai objek, dianggap tidak memiliki gagasan sendiri atau keputusan melaksanakan pertaniannya, semua gagasan pertanian berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, secara individu petani perlu memiliki kesadaran profesional dan tanggungjawab atas pekerjaannya tersebut. Kesadaran ini berdampak pada 'tingkat keseriusan' mereka untuk mensukseskan dan menghasilkan produksi yang baik atas upaya yangtelah dimulainya.

Kesadaran bahwa petani harus memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja terkait, kesadaran bahwa mereka harus bekerja sama dengan pemerintah, lembaga lain, dan petani lain, serta kesadaran untuk berpartisipasi secara luas. Kondisi ini secara umum dapat dikatakan bahwapetani harus melakukan kolaborasi dengan semua komponen *stakeholder*.Pengalaman puluhan tahun bangsa Indonesia dalam bidang pertanian menjadikan mereka matang atas semua

problem yang terjadi. Dampak buruk yang ditinggalkan oleh program modernisasi pertanian menjadi pelajaran yang akan dikoreksi dan tidak akan terulang. Bila dulu asumsi tentang pertanian selalu berkaitan dengan tanaman padi, maka saat ini hal tersebut mengalami perluasan ke tanaman-tanaman lain yang memiliki komoditi menjanjikan seperti tanaman jagung.

Hari ini, tanaman jagung telah menjadi primadona pembangunan pertanian. Bahkan, di sejumlah provinsi tanaman jagung memang menjadi fokus pengembangan dan bukan tanaman padi. Beberapa provinsi lainnya fokus ke pengembangan tanaman padi dan bukan tanaman jagung.

Gorontalo hari ini dapat disebut sebagai lumbung jagung. Hal ini karena meningkatnya produksi jagung hingga bisa melakukan ekspor ke mancanegara yaitu Philipina yang merupakan negara lumbung padi. Pemerintah Gorontalo melakukan ekspor jagung sebanyak 12.500 ton pada bulan Agustus 2020 (Shabrin Maku). Hal ini menunjukkan sebuah prestasi yang membanggakan karena memperlihatkan hasil dari kerja keras yang telah mereka jalankan secara sistematis dan terencana selama ini.

Pencapaian prestasi tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Pertanian antara lain menyalurkan bantuan benih jagung kepada masyarakat di berbagai wilayah seperti di Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo (Gopos.id). Melalui

bantuan ini, produksi jagung dari petani jagung Gorontalo terbukti meningkat tajam dari yang tadinya hanya 692 ribu ton di 2016, menjadi 1,5 juta ton di 2018. Bahkan dari total ekspor jagung 380 ribu ton di 2018, 113 ribu tonnya adalah hasil produksi petani Gorontalo. Angka ini lebih besar dari target awal yang hanya 58 ribu ton (Ramadhan, 2021). Hal ini juga diperkuat oleh salah satu penelitian oleh Indrianti bahwa imbalan penerimaan dan biaya usahatani jagung di Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme sebesar 1,65 sehingga dinilai menguntungkan.

Mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tersebut, Polda Gorontalo juga tidak tinggal diam. Mereka melakukan pendekatan emosional dengan petani jagung agar bisa dekat dan bersahabat dengan masyarakat, sehingganya mereka dapat melayani melindungi dan mengayomi masyarakat. Melalui Brimob Gorontalo mereka ikut membantu warga menanam jagung di Kabupaten Gorontalo.

Pencapaian prestasi ekspor jagung menunjukkan adanya wujud interaksi sosial petani Kabupaten Gorontalo sebagai perilaku budaya masyarakat dalam usaha tani pertanian jagung yang semakin baik. Partisipasi sebagai bagian dari budaya berada pada tingkat optimal, dimana hampir semua unsur masyarakat terlibat di dalamnya dan bekerjasama. Dalam konteks ini pula partisipasi terbukti sebagai bagian dari karakteristik atau ciri khas manusia berbudaya.

Wujud interaksi dalam sistem sosial petani jagung sesungguhnya tidak hanya terjadi sebagai hasil perilaku individu-individu yang hanya

didasarkan pada perasaan dan bersifat semraut, melainkan ia diarahkan dan dituntun oleh sistem nilai dan norma budaya petani jagung. Definisi seperti ini, budaya dipahami sebagai cara-cara hidup atau pola-pola kelakuan dari suatu masyarakat. Menurut Clifford Geertz (1974), seorang ahli antropologi Amerika Serikat yang banyak meneliti masyarakat desa di Indonesia, kaitan manusia dan kebudayaannya diibaratkan sebagai binatang yang terperangkap di dalam 'jerat-jerat makna' yang dia tenun sendiri. Sementara dalam rumusan EB Tylor, bahwa kebudayaan dinyatakan sebagai 'suatu kompleks yang menyeluruh, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat'.

Uraian di atas menggambarkan betapa urgennya sumberdaya sosial-budaya sebagai modal petani dalam meningkatkan produksi jagung. Tentunya petani jagung merespon hal tersebut karena untuk mencapai halitu diperlukan dukungan yang optimal dari lingkungan social dan budaya setempat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya partisipasi petani dalam meningkatkan ekspor komoditas jagung di Kabupaten Gorontalo?

2. Bagaimana signifikansi pemerintah terhadap petani dalam meningkatkan komoditas ekspor jagung di Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana dominasi pemerintah dalam menguatkan partisipasi petani terhadap peningkatan ekspor komoditas jagung di Kabupaten Gorontalo?
4. Bagaimana legitimasi pemerintah terhadap petani jagung dalam meningkatkan ekspor komoditas jagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis dan menjustifikasi budaya partisipasi petani dalam meningkatkan ekspor komoditas jagung.
2. Menganalisis dan menjustifikasi signifikansi pemerintah terhadap petani dalam meningkatkan ekspor jagung di Kabupaten Gorontalo.
3. Menganalisis dan menjustifikasi dominasi pemerintah dalam menguatkan partisipasi petani untuk meningkatkan ekspor komoditas jagung.
4. Menganalisis dan menjustifikasi legitimasi pemerintah dalam meningkatkan ekspor komoditas jagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

## 1. Manfaat teoritis

- a) Bagi akademis, dapat menjadi bahan informasi, masukan serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Ilmu Antropologi dalam upaya meningkatkan mutu mahasiswa berwawasan serta kemampuan menelaah, mengamati serta memberikan kontribusi nyata dalam disiplin ilmu tersebut di atas.
- b) Bagi peneliti untuk menambah wawasan berfikir, mengetahui serta memberikan ide atau gagasan dalam mendeskripsikan kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Akademis, sebagai bahan informasi dan perbandingan serta referensi untuk pengembangan penelitian, terutama yang berkaitan dengan masalah partisipasi sosial.
- b) Bagi pembimbing, sebagai rujukan dalam pemberian bimbingan yang lebih baik guna keberhasilan pencapaian tujuan bimbingannya.
- c) Bagi masyarakat, sebagai masukan untuk lebih mengerti dan memahami partisipasi masyarakat di bidang pertanian secara keseluruhan dan pertanian jagung khususnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

1. Penelitian Jocom, dkk (2009), mengenai dampak Pengembangan Agropolitan Basis Jagung dan Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Gorontalo: Kasus Kabupaten Pohuwato. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa program agropolitan meningkatkan pendapatan usaha tani petani di kawasan agropolitan dengan adanya penyuluhan, intervensi harga dari pemerintah daerah, dan tersedianya infrastruktur jalan usaha tani. Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pendapatan usaha tani di kawasan agropolitan dengan pendapatan usaha tani di kawasan nonagropolitan. Rata-rata pendapatan usaha tani di kawasan agropolitan di kawasan agropolitan lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan usaha tani nonagropolitan, yaitu sebesar Rp 10 080 016.00/ha/thn dan Rp 5506.966.00/ha/thn. Adapun tingkat partisipasi di kawasan agropolitan berdasarkan tingkat partisipasi Arnstein berada pada tingkat konsultasi. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat

masih sebatas pada taraf pelaksana saja karena masyarakat masih belum banyak dilibatkan dalam taraf perencanaan program. Program agropolitan masih sangat bersifat *top down* karena intervensi pemerintah dalam setiap kegiatan masih sangat dominan.

2. Penelitian Syamsul Bahri dan Harifuddin (2019) tentang Lembaga Adat dan Partisipasi Sosial mengungkapkan bahwa Lembaga Adat berpengaruh dalam menggerakkan partisipasi sosial budaya masyarakat di desa Labuku, sedangkan pemerintah desa menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa. Tetapi, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tersebut tetap menggunakan pengaruh Lembaga adat.
3. Penelitian Indrianti (2020) tentang Strategi Pemasaran Komoditi Jagung di Gorontalo. Penelitian ini mengungkap strategi pemerintah meningkatkan partisipasi petani jagung dengan cara: (1) membantu petani jagung memperoleh pinjaman dari bank. (2) memotivasi petani untuk meningkatkan produksi jagung. (3) menyediakan pelatihan pemanfaatan teknologi pembibitan, penanaman, dan panen jagung hingga selesai.
4. Koampa, dkk (2015) meneliti tentang partisipasi kelompok tani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Desa Kanonang Lima, Kecamatan Kawangkoan Barat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Partisipasi Kelompok Tani Terhadap kegiatan penyuluhan pertanian tergolong kategori aktif pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kehadiran partisipasi petani dalam penyuluhan perlu ditingkatkan.

Mengamati hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa partisipasi sosial yang diteliti lebih bersifat administratif (Koampa dkk.) dan konsultatif (Jocom), serta bersifat adat (Bahri, 2019). Adapun penelitian ini melihat atau fokus pada gabungan beberapa faktor seperti partisipasi sosial, solidaritas sosial, dan modal sosial sebagai faktor yang mengkonstruksi petani jagung mensukseskan program pemerintah. Faktor-faktor tersebut lalu dibungkus oleh perspektif teori struktrasi (struktur-aktor).

## **B. Budaya Partisipai Sosial**

Keith Davis (dalam Sastropetro 1988), menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Made Pidarta (2005), juga berpendapat bahwa partisipasi juga pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Mardikanto (2010) partisipasi merupakan suatu

keterlibatan secara aktif, baik alasan dari dalam atau dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Sementara Nasdian (2006) mengartikan partisipasi sebagai proses aktif dan inisiatif yang diambil oleh warga komunitas itu sendiri, dibimbing melalui cara mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Kategori partisipasi meliputi: (1) warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah difikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain; (2) partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subyek yang sadar. Dengan partisipasi, program yang dilaksanakan akan lebih berkelanjutan karena disusun berdasarkan kebutuhan dasar yang sesungguhnya dari masyarakat setempat.

Penekanan berbeda disampaikan oleh Hamidjoyo, (dalam Ibori, 2013), bahwa partisipasi mengandung tiga makna, yaitu ada (1) Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan; (2) Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya; dan (3) Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan otonomitas.

Dari pandangan ahli di atas, konsep dasar partisipasi dapat

dirumuskan bahwa partisipasi terjadi bila ada keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Upaya mengajak peran serta seseorang/kelompok/ masyarakat sebagai bentuk ajakan agar bersangkutan turut memikul beban pembangunan; seseorang/kelompok/masyarakat menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya; dan terakhir partisipasi berarti mewujudkan kreativitas seseorang, kelompok atau masyarakat bersangkutan.

Dalam konteks pembangunan, pelibatan masyarakat menurut Hetifah S.J. Soemarto (2003), terjadi bila ada proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan dari sisi pembangunan kesejahteraan sosial Isbandi (2007:27) menjelaskan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dari pandangan diatas maka partisipasi dalam pembangunan/ penyelenggaraan kesejahteraan sosial terjadi bila ada identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Proses akhir tersebut akan menjadi bahan yang akan dimusyawarahkan dan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai rumusan akhir program, kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Theresia, dkk (2014), untuk tumbuhnya partisipasi sebagai suatu tindakan yang nyata, diperlukan tiga persyaratan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut;

- (1) Adanya kesempatan untuk berpartisipasi;
- (2) Kemampuan untuk berpartisipasi
- (3) Kemauan berpartisipasi

Partisipasi masyarakat terbagi menjadi empat tahap menurut Uphoff et al (1979), yaitu:

1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam

pemberdayaan, sebab inti dari pemberdayaan adalah pelaksanaannya.

3. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
5. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal), yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden seperti dikutip Sunarti (2012), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Bentuk partisipasi, menurut Ericson seperti dikutip Slamet (1994) yang diberikan kepada masyarakat dalam tahapan pembangunan memiliki beberapa bentuk yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*).

Partisipasi pada tahap mempunyai maksud adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat mampu berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang, serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; dan

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan. Partisipasi pada tahap ini

maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang pengoperasian, serta memelihara proyek yang telah dibangun.

Terdapat usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan beberapa kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum

partisipasi menurut Sunarti (2012) yaitu:

1. Masyarakat menyadari bahwa situasi sekarang tidak memuaskan, tidak sesuai dengan tujuan merek, yang mungkin untuk dirubah dan diperbaiki, serta mereka akan menyumbang terhadap perubahan situasi ini;
2. Masyarakat harus diyakinkan bahwa keuntungan berkaitan dengan proses pembangunan direncanakan dan partisipasi mereka lebih besar dari biayanya. Masyarakat diyakinkan bahwa bahwa akan mendapatkankeuntungan ekologi, sosial atau material;
3. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlihat dalam beberapa tahap dari proses pembangunan yang direncanakan. Masyarakat akan berpartisipasi bila dari konteks sosial dan politik membuatnya mungkin untuk berpartisipasi.

Dalam makalahnya yang berjudul "*A Ladder of Citizen Participation*" seperti dikutip Journal of The American Planning Association, Arnstein (1969) mengemukakan delapan tangga atau tingkatan partisipasi. Delapantingkat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manipulation (Manipulasi)

Dengan mengatasnamakan partisipasi, masyarakat diikutkan sebagai 'stempel karet' dalam badan penasihat. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh penguasa.

## 2. Therapy (Terapi)

Pada tingkat terapi atau pengobatan ini, pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidakberdayaan sebagai penyakit mental. Dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok orang yang memerlukan pengobatan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukan karena menemukan penyebab lukanya.

## 3. Informing (Menginformasikan)

Dengan memberi informasi kepada masyarakat akan hak, tanggungjawab, dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun seringkali pemberian informasi dari penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi. Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan media pemberitahuan, pamflet, dan poster.

#### 4. Consultation (Konsultasi)

Meminta pendapat masyarakat merupakan suatu langkah logis menuju partisipasi penuh. Namun konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan diperhatikan. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jajak pendapat, pertemuan warga, dan dengar pendapat. Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah partisipasi palsu. Masyarakat pada dasarnya hanya dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi mereka diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan, seberapa banyak brosur yang dibawa pulang dan juga seberapa banyak dari kuesioner dijawab. Dengan demikian, pemegang kekuasaan telah memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian pelibatan masyarakat.

#### 5. Placation (Menenangkan)

Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat memang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan rencana akan tetapi pemegang kekuasaanlah yang berwenang untuk menentukan. Salah satu strateginya adalah dengan memilih masyarakat miskin yang layak untuk dimasukkan ke dalam suatu lembaga. Jika mereka tidak bertanggungjawab dan jika pemegang kekuasaan memiliki mayoritas kursi, maka mereka akan dengan mudah dikalahkan dan diakali.

#### 6. Partnership (Kemitraan)

Pada tingkatan ini kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggungjawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Aturan ditentukan melalui mekanisme take and give, sehingga diharapkan tidak mengalami perubahan secara sepihak. Kemitraan dapat berjalan efektif bila dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisir, pemimpin bertanggungjawab, masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya serta adanya sumberdana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat. Dengan demikian, masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar menawar yang tinggi sehingga akan mampu mempengaruhi suatu perencanaan.

#### 7. Delegated Power (Kekuasaan didelegasikan)

Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat menduduki mayoritas kursi, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain itu masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya akan tetapi dengan mengadakan proses tawar menawar.

## 8. Citizen Control (Kontrol warga negara)

Pada tingkat ini masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada mereka, bertanggungjawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga yang akan mengadakan perubahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati pihak ketiga.

Manipulasi dan Terapi termasuk ke dalam level 'non-partisipasi', inisiatif pembangunan tidak bermaksud untuk memberdayakan masyarakat akan tetapi membuat pemegang kekuasaan untuk "menyembuhkan" atau "mendidik" komunitas. Informasi dan konsultasi termasuk dalam level 'tokenisme'. Komunitas bisa mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat akan tetapi tidak ada jaminan kalau pendapat komunitas akan diakomodasi. Placation sebagai level tertinggi dalam tokenisme. Komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tetapi penentuan tetap berada pada pemegang kekuasaan.

Kemitraan, membuat komunitas dapat bernegosiasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendelegasian kewenangan dan kontrol, komunitas memegang mayoritas pengambilan keputusan dan kekuatan pengelolaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikelompokkan menjadi

4 tahap, yaitu: (1) partisipasi dalam tahap perencanaan, (2) partisipasi dalam tahap pelaksanaan, (3) partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan, dan (4) partisipasi dalam tahap pengawasan. Manfaat partisipasi peserta dalam suatu pelatihan, secara teoritik ditentukan oleh banyak faktor, terutama faktor ketertarikan (interest), kualitas pengetahuan dan keterampilan yang dilatihkan, rasa memiliki dan tanggungjawab, percaya diri, motivasi dan kebanggaan akan program, dan faktor waktu dan biaya implementasi hasil pelatihan (Cornell University, 2006).

## **C. Teori Solidaritas Sosial**

### **1. Pengertian Solidaritas Sosial**

Pembagian kerja memiliki implikasi yang sangat besar terhadap struktur masyarakat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Untuk menyimpulkan perbedaan ini, Durkheim membagi solidaritas menjadi solidaritas mekanik dan organik. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanik menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktifitas dan juga tipe pekerjaan yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organik bertahan bersama justru karena adanya

perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda – beda (Ritzer, 2014).

Emile Durkheim dalam pengelompokan keilmuan sosial masuk dalam kategori Fakta Sosial, fakta sosial ini mendominasi ide besar Durkheim dengan gagasan utama dia berupa kecenderungan individu serta kecenderungan kolektif (Bachtiar, 2010). Sebelum mengerucut kepada pembagian Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik (Ritzer, 2013), gagasan Durkheim tentang masyarakat adalah mengamati sisi sosial suatu individu dengan segenap hal yang mengiringinya. Indikator dari fakta sosial adalah unsur material dan non-material, sebagaimana dijelaskan diatas, maka fakta sosial berupa bagaimanakah seorang anak itu dibesarkan serta dididik dengan pola lingkungan yang dia miliki. Segala aktifitas yang berhubungan dengan individu seorang anak baik berupa pembiasaan menggunakan tangan kanan, menunduk ketika berada di depan orang yang lebih tua, mengucapkan salam, mandi disaat pagi dan sore, sarapan di waktu tertentu, istirahat atau tidur di waktu malam hari, dan segala hal yang berkaitan dengan pembiasaan pada diri seseorang dinamakan dengan fakta sosial (Siahaan, 1986).

Faktor lain yang mendukung bahwa paradigma yang digagas Durkheim ini adalah fakta sosial dengan adanya sebuah tawaran “jiwa kelompok” yang bisa mempengaruhi sosok individu. Jika di awal tadi menegaskan bagaimanakah sosok individu itu tumbuh berkembang

dengan rutinan yang ia terima, maka dalam konsep jiwa kelompok ini adalah bagaimana interaksi sosok individu tadi dengan lingkup masyarakat yang ada di lingkungannya (Siahaan, 1986). Konsep yang hidup dalam masyarakat ini tidak bisa dijelaskan dengan keterangan biologis maupun psikologis dari seorang secara individu. Kesulitan ini disebabkan karena fakta sosial yang bersifat eksternal atau diluar dari individu tadi sehingga objek yang dimiliki oleh fakta sosial independent atau terlepas dari individu. Padahal dalam pandangan Durkheim individu dengan fakta sosial yang berada di posisi eksternal adalah dua hal yang berbeda (Ritzer, 2014).

Emile Durkheim, sosok yang memiliki kerangka teori Solidaritas Sosial yang mumpuni menawarkan alternatif teori solidaritas untuk pisau analisa objek kajian ini. Solidaritas yang dikembangkan oleh Emile Durkheim tercantum dalam maha karyanya yang berjudul "*The Division of Labour in Society*". Dalam istilah yang digunakan oleh Durkheim, masyarakat dengan taraf kehidupan yang masih menggunakan Solidaritas Mekanik cenderung masyarakat yang memiliki tanda kehidupan yang sederhana, Durkheim memberinya istilah dengan masyarakat "segmental" (Siahaan, 1986).

Dalam pernyataannya Durkheim menegaskan: "Dalam masyarakat demikian kelompok manusia tinggal secara tersebar dan hidup terpisah satu dengan yang lain. Masing – masing kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing – masing tanpa memerlukan bantuan atau kerja

sama dengan kelompok di luarnya. Masing – masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh anggota lain; pembagian kerja belum berkembang dan semua anggotasama, sehingga ketidaksadaran seorang anggota kelompok tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kelompok, karena peran anggota tersebut dapat dijalankan orang lain” (Kamanto, 2004).

Istilah solidaritas kian kuat manakala sebagai kumpulan yang menjadi landasan kelompok dalam masyarakat. Ada beberapa hal atau unsur yang melatar belakangi adanya sistem Solidaritas, semisal;

- a. persamaan agama,
- b. persamaan bahasa,
- c. adanya taraf perekonomian yang sama,
- d. saling memiliki bantuan serta kerjasama,
- e. memiliki akar sejarah atau pengalaman yang sama,
- f. serta memiliki tindakan atau pilihan kehidupan yang sama pula.

(Wirawan, 2012).

Durkheim melihat solidaritas sosial sebagai suatu gejala moral. Hal ini terutama dilihat dari ikatan kelompok desa. Adanya ketertiban sosial atau tertib sosial yang sedikit di kota dibandingkan dengan gangguan ketertiban di desa, menurut Durkheim disebabkan karena faktor pengikat di desa ditingkatkan menjadi moralitas masyarakat. Fakta ini terutama adalah;

- a. Kontrol sosial masyarakat desa

b. Stabilitas keluarga (Susanto, 1983).

Dalam pandangan Durkheim, suatu kelompok yang tertutup yang terbiasa untuk bersaing adalah mereka masyarakat di perkotaan. Sementara apa yang ditemukan oleh Durkheim di masyarakat desa adalah tidak adanya alternatif serta wujud kerja kolektif karena faktor terpencil dari masyarakat desa itu sendiri. Oleh karenanya Durkheim memberikan istilah dengan sebutan Solidaritas Sosial Mekanik.

Adapun beberapa karakter Solidaritas Mekanik antara lain;

- a. Memiliki ikatan lebih kuat ke dalam dari pada di luar
- b. Memiliki perhatian skala lokal dan berpusat pada kehidupan desa dengan segenak sikap untuk menghindari pertentangan dan lebih banyak bersatu dengan mereka yang sependapat (*like minded*)
- c. Kekurangan individu dirasakan sebagai kekurangan masyarakat desa secara keseluruhan (Jones, 2009).

Dalam ulasan yang disampaikan oleh Durkheim: dari solidaritas yang ia maksud adalah; “kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antar individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama” (Jones, 2009).

Apa yang disebut oleh Durkheim dengan solidaritas sosialmekanik adalah sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki rasa perasaan yang sama, memiliki kecenderungan yang sama, masyarakat

lebih didominasi dengan keseragaman atau homogen, dan jika diantara anggota masyarakat itu ada yang hilang maka tidak memiliki pengaruh besar yang berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut.

Pada kesempatan lain Durkheim juga menjelaskan seperti apa ciri masyarakat dengan karakter Solidaritas Mekanik; "ciri masyarakat dengan solidaritas mekanik ini ditandai dengan adanya kesadaran kolektif, dimana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat pada ketaatan karena nilai – nilai keagamaan yang masih sangat tinggi, taraf masyarakat yang masih sederhana, kelompok masyarakat yang tersebar, masing–masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh orang lain, pembagian kerja yang belum berkembang dan hukuman yang terjadi bersifat represif yang dibahas dengan penghinaan terhadap kesadaran kolektif sehingga memperkuat kekuatan di antara mereka" (Henselin, 2006).

Sementara kriteria solidaritas kedua adalah, solidaritas organik. Sedikit berbeda dengan solidaritas mekanik, solidaritas organik lebih cenderung diaplikasikan oleh masyarakat yang sudah kompleks. Masyarakat kompleks ditandai dengan adanya banyak ragam pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan dengan rasa saling ketergantungan antar anggota (Henselin, 2006). Solidaritas organik banyak ditemukan pada masyarakat perkotaan. Seperti karakter pembagian kerja, maka masing – masing bagian dari komponen solidaritas organik memiliki peran yang sama pentingnya. Hal ini disebabkan apa yang muncul dari masing

bagian itu berbeda akan tetapi memiliki esensi kepentingan yang sama.

Dalam solidaritas organik, meskipun memiliki aspek kepentingan yang berbeda namun membentuk satu saling ketergantungan. Setiap individu tidak bisa lepas antar bagian satu dengan bagian yang lain. Hukum yang berlaku dalam solidaritas organik adalah hukum restitutif yang berarti menggantikan. Hal yang menjadi karakter dari solidaritas organik salah satunya adalah hubungan yang berkaitan untuk menciptakan efisiensi kerja yang adadi dalam masyarakat.

Karakter lain yang melekat adalah hubungan ini diaplikasikan oleh masyarakat perkotaan atau masyarakat yang modern, tata kerja serta sistem yang berjalan begitu profesional, jika ada satu anggota yang berhalangan maka harus menemukan individu atau partner pengganti dibidangnya, dan terakhir masing individu memiliki semangat kinerja yang tinggi dengan mental individualistik dalam bekerja (Ritzer, 2014).

Oleh karena karakter yang terdapat di solidaritas organik beda dengan karakter mekanik, maka spesialisasi ahli yang ada di dalam solidaritas organik menuntut peranan yang tersendiri untuk menciptakan hubungan berkaitan dan saling membutuhkan. Karena jika ada satu bagian yang tidak menjalankan atau tidak bisa memenuhi apa yang terdapat dalam sistem solidaritas organik maka harus ada person lain untuk menggantikannya.

Untuk memberikan penilain permukaan antara perbedaan solidaritas mekanik dan solidaritas organik dengan menggunakan objek

jamaah pengajian misalnya. Maka akan kita temukan jika jamaah pengajian itu diisi oleh pembicara sentral, memiliki simbol untuk menarik gerakan jamaahnya, ada waktu khusus dan tertentu dalam pelaksanaannya menjadi karakter permukaan yang dimiliki masyarakat atau kelompok pengajian mekanik. Sementara jika kelompok pengajian tersebut terjadwal dengan rapi, pengisi kajian tersebut fleksibel dan tidak tersentralkan, tidak ada simbol khusus yang menandai pelaksanaan kajian tersebut. Maka secara permukaan kelompok tersebut adalah kelompok pengajian organik.

Pertimbangan lain yang bisa ditarik dari dua karakter solidaritas ini adalah, apa yang terdapat dalam kelompok kajian mekanik lebih homogen komposisi masyarakatnya atau pengikutnya dibandingkan dengan kelompok kajian organik yang lebih pada heterogen. Kelompok kajian mekanik banyak didominasi oleh mereka yang berada di pedesaan, dimana homogenitas masuk dalam berbagai faktor, semacam homogenitas ragam pekerjaan, homogenitas kepercayaan, homogenitas ideologi, homogenitas taraf kehidupan. Hal ini akan berbeda jika berdampingan dengan kelompok pengajian organik, kelompok pengajian organik akan melepas karakter homogenitas mereka, sehingga ragam taraf pekerjaan berbeda, heterogen dalam ideologi, bahkan heterogen dalam kepercayaan jugamuncul.

Untuk melihat sisi lain apakah masyarakat itu memiliki pola solidaritas mekanik atau organik bisa melalui konsekuensi hukuman yang

mereka terapkan. Karena apa yang Durkheim temukan dalam masyarakat solidaritas mekanik hukuman yang berjalan adalah represif, dimana pelaku kejahatan atau mereka yang melanggar aturan akan mendapatkan konsekuensi hukuman secara bersama. Hukuman yang diterapkan dalam solidaritas mekanik adalah untuk mempertahankan keutuhan, menumbuhkan kesadaran bersama.

Sementara apa yang terdapat dalam masyarakat solidaritas organik hukuman bersifat restitutif. Dimana substansi hukuman yang ada bertujuan untuk memulihkan keadaan yang normal. Skap restitutif ini dikarenakan komposisi masyarakat yang kompleks dan memiliki kepentingan individu masing – masing.

## **2. Pembagian Solidaritas Sosial**

Dalam pembahasan di depan dijelaskan bagaimana solidaritas sosial itu terbagi menjadi solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Emile Durkheim, sebagai bapak solidaritas sosial, menaruh solidaritas ini dalam paradigma Fakta Sosial. Dalam penjelasan fakta sosial yang memiliki indikator material maupun non-material, indikasi tersebut bisa muncul dalam masyarakat yang berlainan tipikal solidaritas berupa pembagian pos kerja, bagian ahli dalam aspek kebutuhan memiliki implikasi besar bagi struktur masyarakat, Durkheim menjelaskan sebagai berikut;

“Durkheim paling tertarik pada cara yang berubah yang

menghaskan solidaritas sosial, dengan kata lain, cara yang berubah yang mempersatukan masyarakat dan bagaimana para anggotanya melihat dirinya sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Untuk menangkap perbedaan tersebut Emile Durkheim mengacu kepada dua tipe Solidaritas yaitu mekanik dan organik. Suatu masyarakat yang dicirikan oleh mekanik bersatu karena semua orang adalah generalis. Ikatan diantara orang – orang itu adalah karena mereka semua terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang mirip dan memiliki tanggung jawab – tanggung jawab yang mirip. Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas organik dipersatukan oleh perbedaan diantara orang – orang, oleh fakta bahwa semuanya mempunyai tugas – tugas dan tanggung jawab yang berbeda” (Henselin, 2006).

Dari keterangan di atas, Durkheim memberikan sumbangsih besar dalam dunia keilmuan sosiologi, yaitu dengan cara baca masyarakat dengan tipikal masyarakat solidaritas mekanik dengan masyarakat solidaritas organik. Argumen lain yang dibangun oleh Durkheim adalah: “masyarakat – masyarakat yang tidak modern mempunyai nurani kolektif yang lebih kuat, yakni, pengertian – pengertian, norma – norma, dan kepercayaan – kepercayaan yang lebih banyak dianut bersama. Sedangkan pembagian kerja yang bertambah telah menyebabkan kurangnya nurani kolektif. Namun kolektif jauh kurang berarti dalam masyarakat dengan solidaritas organik dalam masyarakat mekanik”

(Henselin, 2006).

Sudut pandang yang diambil oleh Durkheim untuk melihat masyarakat adalah bagaimana sistem solidaritas yang berlaku didalamnya. Karena bentuk solidaritas suatu masyarakat mengindikasikan bentuk dan perkembangan masyarakat dalam melewati perubahan zaman, “masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Perbedaan antara solidaritas sosial mekanik dan organik merupakan salah satu sumbangan Durkheim yang paling terkenal. Jadi berdasarkan bentuknya, solidaritas sosial masyarakat dibedakan menjadi solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik” (Henselin, 2006).

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa fakta sosial berada di luar faktor individu, sementara bentuk dari fakta sosial menurut Durkheim mengikat dan muncul dari masyarakat sehingga membentuk karakter individu. Menurut Durkheim, adanya fakta sosial akan menumbuhkan kesadaran kolektif pada masyarakat. Kesadaran kolektif ini juga berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Adapun istilah kesadaran kelompok yang muncul dalam Durkheim adalah Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik (Henselin, 2006). Lebih rinci tentang apa itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik sebagai berikut;

### **a. Solidaritas Mekanik**

Solidaritas mekanik merupakan kesadaran kolektif yang muncul di dalam tumbuhnya masyarakat, solidaritas mekanik memiliki wewenang memerintah atas bagian mayoritas suatu masyarakat. Keyakinan yang hidup secara bersamaan dalam tubuh masyarakat, kemudian perasaan yang sama, tingkah laku yang sama mempersatukan orang menjadi sekelompok masyarakat (Johnson, 1994). Kondisi demikian menjadikan sebuah mentalitas kelompok yang memiliki dampak jika dicela satu maka itu sama dengan mencela kepada segenap kelompok yang ada. Kondisi inilah yang membuat sosial masyarakat dengan istilah “mekanik”, persatuan antar anggota begitu terlihat, sehingga reaksi spontan dan muncul secara alami atas apa yang menimpa satu anggota akan secara bersamaan tumbuh di benak segenap anggota. Ada perasaan persatuan antar anggota.

Oleh karena ikatan yang menjadi karakter Solidaritas Mekanik adalah sebuah simbol – simbol yang menyatukan seluruh anggota. Baik itu berupa persatuan cita – cita, visi, tujuan hidup (Ritzer, 2014). Maka adanya beberapa simbol yang mengikat antar anggota baik berupa simbol dewa, benda, atau hal yang mereka sakralkan menjadi indikator masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik adalah karakter masyarakat sederhana (Ritzer, 2014).

Masyarakat sederhana memiliki pola interaksi yang masing anggota bisa mencukupi kebutuhannya, dalam masyarakat sederhana ini

intensitas serta komunikasi yang terjadi sangat sering. Dalam masyarakat sederhana juga tidak ada pembagian tugas antar individu yang spesifik, sehingga segala kebutuhan sudah tersedia di dalam tubuh masyarakat sederhana ini. Jika ada satu individu dalam masyarakat ini yang berhalangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok maka posisi yang dia miliki bisa dengan mudah diganti oleh anggota yang lain.

Dalam masyarakat sederhana inilah Durkheim melihat adanya kesadaran kolektif, kerjasama yang kuat, gotong royong, kontribusi yang total, memiliki kepercayaan yang sama, memiliki tujuan serta impian dalam membentuk cita – cita yang sama, serta memiliki ikatan yang berdasarkan moral yang sama (Ritzer, 2014).

Sebagai ciri khas dari pada masyarakat solidaritas mekanik adalah adanya solidaritas yang didasarkan pada ragam homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan lainnya. Menurut Durkheim, solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness/conscience*), yang menunjuk pada “totalitas kepercayaan – kepercayaan dan sentimen –sentimen bersama yang rata – rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Itu merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada individu – individu yang memiliki sifat – sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama juga. Karena itulah individualitas tidak berkembang, individualitas terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas.”(Ritzer, 2014).

Dalam pandangan Durkheim juga dikemukakan bahwa solidaritas mekanik dikendalikan oleh hukum yang bersifat dan berlaku kesepahaman anggota masyarakat tersebut. Sehingga wujud pelanggaran atas suatu hukuman menjadi tekanan bersama kepada pelaku yang melanggar peraturan atau kesepakatan umum. (Ritzer, 2014).

Sikap masyarakat yang memiliki solidaritas sosial mekanik terhadap kelompok yang melawan atau mengancam eksistensi lebih banyak pertimbangan stabilitas masyarakat yang berjalan disana. Sehingga pertimbangan ini mengesampingkan aspek rasionalitas atau dampak yang terjadi setelah konsekuensi itu ditunaikan.

#### **b. Solidaritas Organik**

Meski memiliki nilai dasar sama yaitu solidaritas sosial, akan tetapi solidaritas organik berbeda dengan solidaritas mekanik. Secara sekilas solidaritas organik lebih pada kompleksitas anggota masyarakat, sedangkan menurut prosesnya apa yang terjadi dalam solidaritas organik merupakan lompatan dari solidaritas mekanik. Karena untuk mengkomparasikan antara solidaritas mekanik dan organik maka solidaritas organik memiliki komponen masyarakat yang maju, modern, dan majemuk. Untuk melihat seperti apakah potret masyarakat dengan solidaritas organik, definisi Johnson bisa menjadi sebuah tawaran: "Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar.

Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu” (Johnson, 1994).

Munculnya masyarakat dengan karakter solidaritas organik bukan serta merta ada keruntuhan dalam diri masyarakat tersebut, atau ada indikasi bahwa masyarakat itu mengalami kemunduran. Meski memiliki indikator – indikator semisal; adanya ketergantungan antar individu dengan individu lain, ragamnya kepercayaan dan keyakinan, ragam pekerjaan yang hidup di dalam masyarakat, munculnya berbagai ragam perbedaan, adanya gaya hidup yang bermacam–macam, tidak menandai bahwa masyarakat tersebut mengalami kemunduran.

Durkheim memberikan catatan bahwa kuatnya solidaritas yang mereka bangun juga dilandasi dengan pola hukum restitutif (pemulihan) adalah bentuk kesepakatan masyarakat yang majemuk dengan tujuan untuk memulihkan suasana, dalam penerapan hukum restitutif tidak mengandung umpatan atau ungkapan secara masif seperti halnya yang terjadi di kelompok masyarakat mekanik (Ritzer, 2014).

Struktur masyarakat demikian sudah terbangun dari kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Dimana pada masyarakat solidaritas mekanik kelompok kecil dari mereka memiliki homogenitas dengan keluarga lainnya. Satu kelompok dengan mata pencaharian yang sama

semisal petani, nelayan, berkebun, dan mata pencaharian yang relatif sama. Sementara dalam komponen masyarakat yang memiliki solidaritas organik, kelompok kecil masyarakat berupa keluarga mereka lebih didominasi profesi yang ragam sesuai dengan perkembangan sosial yang mengiringinya (Soyomukti, 2016).

Menurut Durkheim, pengisian setiap profesi kerja yang terjadi pada masyarakat dengan solidaritas sosial organik tidak bisa dipenuhi dengan dasar kolektif. Adanya saling membutuhkan yang berasas pada aspek fungsional ini mengantarkan masyarakat pada keberadaan otonom masing individu. (Johnson, 1994).

Proses demikian membentuk masyarakat dengan latar belakang heterogenitas tinggi, kondisi masyarakat yang plural dan majemuk. Masyarakat lebih menjunjung tinggi apa itu bakat pribadi, masyarakat juga memahami apa itu hak dan kewajiban masing–masing individu, profesi masing–masing individu juga berbeda – beda menyesuaikan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena jangkauan yang luas itulah maka komposisi masyarakat kian plural.

Sebagai pemungkas dari karakter solidaritas organik, bahwa apa yang terjadi pada kompleksitas serta ketergantungan yang tidak diindikasikan oleh homogenitas bukanlah suatu kemunduran, justru dengan adanya saling membutuhkan dengan ragam pekerjaan akan semakin membentuk masyarakat yang kuat dan memiliki rasa solidaritas untuk kesatuan. Namun adanya fungsi hukum yang restitutif adalah

untuk mengembalikan suatu keadaan kepada kondisi yang normal. Dalam konsekuensi kepada yang merusak tatanan masyarakat yang memiliki solidaritas organik juga memuat kemarahannya yang bersifat kolektif.

Dari uraian dua solidaritas yang ditawarkan oleh Emile Durkheim, pendekatan solidaritas mekanik memiliki kedekatan untuk membaca kasus dalam objek kajian.

### **3. Bentuk-bentuk Solidaritas Sosial**

Adapun bentuk serta wujud solidaritas sosial yang ada di dalam masyarakat sangat beragam, dimana kerja kolektif serta hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok terjalin (Soyomukti, 2016) Di antara bentuk solidaritas sosial adalah:

#### **a. Gotong Royong**

Bentuk solidaritas yang sering kita temui di dalam masyarakat adalah gotong royong, menurut Shadily, gotong royong adalah rasa dan pertalian kesosialan yang sangat teguh dan terpelihara. Gotong royong lebih banyak dilakukan di desa daripada di kota diantara anggota – anggota golongan itu sendiri. Kolektifitas terlihat dalam ikatan gotong royong yang menjadi adat masyarakat desa. Gotong royong menjadi bentuk solidaritas yang sangat umum dan eksistensinya di masyarakat juga masih sangat terlihat hingga sekarang, bahkan negara Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang mempunyai jiwa gotong - royong yang tinggi (Soyomukti, 2016).

## **b. Kerjasama**

Selain gotong royong yang merupakan bentuk dari solidaritas sosial adalah kerjasama. Menurut Sathily, kerjasama adalah proses terakhir dalam penggabungan. Proses ini menunjukkan suatu golongan kelompok dalam hidup dan geraknya sebagai suatu badan dengan golongan kelompok yang lain yang digabungkan itu. Kerjasama merupakan penggabungan antara individu dengan individu yang lain, atau kelompok dengan kelompok yang lain sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati bersama (Soyomukti, 2016). Setelah tercapai penggabungan itu barulah kelompok itu dapat bergerak sebagai suatu badan sosial. Sehingga kerjasama itu diharapkan memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang mengikutinya dan tujuan utama dari bekerjasama bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang mengikutinya.

Munculnya kerjasama disebabkan adanya orientasi orang – perseorangan terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan out-group-nya). Kerjasama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang mengancam atau tindakan – tindakan yang menyinggung secara tradisional atau institusional yang telah tertanam didalam kelompok (Soekanto, 2017).

Ada lima bentuk kerjasama yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerukunan yang mencakup gotong – royong dan tolong menolong

- 2) *Bergaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi
- 3) *Kooptasi*, proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi
- 4) *Koalisi*, kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama
- 5) *Join venture*, yaitu kerjasama dalam perusahaan proyek tertentu (Soyomukti, 2016).

Kesimpulannya, jika seseorang atau kelompok orang itu memiliki lawan maupun kawan yang sama, maka perasaan solidaritas diantara mereka juga akan semakin kuat, jadi intensitas kerjasama diantara mereka juga lebih tinggi.

### **c. Modal Sosial**

Modal sosial merupakan kekuatan yang dianggap mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, sehingga basis modal sosial adalah *trust*, *ideologi* dan *religi*. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas. Dampak dari kerelaan ini akan menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial.

Fukuyama (2000) mengilustrasikan modal sosial dalam *trust*,

*believe and vertrauen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. *Trust* muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. Coleman (1990) menegaskan bahwa, modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (1998) bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Serageldin memberikan klasifikasi modal sosial antara lain: (1) Modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang tahan lama tetapi hubungan searah, seperti pengajaran dan perdagangan sedang interaksi sosial yang hubungannya *resiprokal* (timbang balik) seperti jaringan sosial dan asosiasi. (2) Modal sosial dalam bentuk efek interaksi sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah seperti kepercayaan, rasa hormat dan imitasi sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti gosip, reputasi, *pooling*, peranan sosial dan koordinasi.

Berkaitan dengan menumbuhkan sikap demokratis, pada bagian lain North (1990) menyebutkan relasi modal sosial diformulasikan dalam

berbagai struktur, misalnya pemerintah, rejim politik, aturan hukum dan sistem peradilan. Berangkat dari jalannya pemerintahan, rejim politik, aturan hukum, dan sistem peradilan akan berdampak pada munculnya sikap-sikap demokratis dari bawah atau masyarakat lokal.

Menurut Coleman (1990) modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya.

Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai "*features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*". Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaring kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikemukakan Bank Dunia (1999) modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial pun tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan

anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena: (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama. Masyarakat merujuk pada kelompok manusia yang memadukan diri, berlandaskan pada kepentingan bersama, ketahanan dan kekekalan atau kesinambungan.

Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya

modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pihak luar.

Uphoff (dalam Dasgupta dan Ismail Serageldin, *ed.*, 2000:215-243) mengatakan bahwa, modal sosial sangat membantu jika dipahami dalam dua kategori, yaitu struktural dan kognitif. Kategori pertama diasosiasikan dengan berbagai bentuk organisasi sosial, khususnya peran, aturan, preseden, prosedur dan jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perilaku kerjasama, serta terutama sekali terhadap tindakan kolektif yang memberi manfaat timbal-balik. Kategori yang kedua berasal dari proses mental dan hasil gagasan-gagasan yang diperkuat oleh budaya dan ideologi, khususnya norma-norma, nilai-nilai, sikap perilaku, dan keyakinan yang memberikan kontribusi terhadap perilaku kerjasama. Kedua kategori tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lain.

Dalam pandangan Uphoff, modal sosial dapat ditelusuri bentuknya, dari yang paling minimum, elementer, substansial hingga maksimum. Hal ini karena karakteristik modal sosial itu sendiri mengandung makna "*some degree of mutuality, some degree of common identity, some degree of cooperation for mutual, not just personal, benefit*" (Dasgupta dan Ismail Seregeldin [ed] (2000:222). Modal sosial dapat dianalisa melalui fenomena-fenomena perilaku sebagaimana digambarkan berikut ini.

Tabel 1.1. Sumber-sumber terbentuknya modal sosial

Aspek	Struktural	Kognitif
Sumber dan Manifestasi	peran and aturan, jaringan dan relasi individu lainnya, Prosedur dan Preseden	Norma-norma, nilai-nilai, sikap/tingkah laku, kelayakan
Domain	Organisasi Sosial	Budaya masyarakat
Faktor Dinamis	jaringan horizontal dan jaringan vertical	kepercayaan, Solidaritas, kerjasama, derma ( <i>generosity</i> )
Elemen umum	Espektasi-espektasi yang melahirkan perilaku kerjasama yang kemudian menghasilkan manfaat timbal-balik ( <i>mutual benefit</i> )	

Sumber: Uphoff dikutip oleh Dasgupta dan Ismail Serageldin[ed.]

(2000:215-243)

Mengacu pada konsep-konsep dalam tabel di atas, yang dimaksud dengan modal sosial yaitu: pertama, institusi-institusi, relasi-relasi, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk perilaku kerjasama dan

koordinasi tindakan-tindakan bersama untuk suatu tujuan yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama. Kedua, kapabilitas yang muncul dan prevalensi kepercayaan dalam suatu masyarakat atau di dalam bagian-bagian tertentu dalam masyarakat.

#### **D. Teori Strukturasi Giddens**

Giddens dengan Teori Strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme (pertentangan) dan mencoba mencari pertautanantara struktur-fungsional dengan konstruksionisme-fenomenologis. Menurutnya strukturasi mengandung tiga dimensi, yaitu: *Pertama*, pemahaman (*interpretation/understanding*), yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu. *Kedua*, moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. *Ketiga*, Kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan.

##### **1. Agen dan Agensi**

Konsep agen biasa disebut juga aktor, sedangkan agensi umumnya diasosiasikan dengan kebebasan, kehendak bebas, tindakan kreativitas, orisinalitas dan kemungkinan perubahan melalui aksi agen bebas. Pandangan bahwa agen itu bebas dalam arti tidak ditentukan dan tidak dapat dipertahankan karena dua alasan: Terdiri dari apa saja tindakan manusia yang tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi? Tindakan seperti ini ialah sesuatu yang diciptakan secara spontan dari

ketiadaan suatu bentuk metafisis dan mistis ciptaan orisinal. Subjek ditentukan, dipengaruhi dan diproduksi, oleh kekuatan sosial yang ada di luar dirinya sendiri sebagai individu. Giddens menyebutnya sebagai Dualitas Struktur (Giddens, 1991).

Monitoring reflektif aktivitas merupakan ciri terus menerus tindakan sehari-hari dan melibatkan perilaku tidak hanya individu namun juga perilaku orang-orang lain. Intinya, aktor-aktor tidak hanya senantiasa memonitor arus aktivitas-aktivitas dan mengharapkan orang lain berbuat sama dengan aktivitasnya sendiri; mereka juga secara rutin memonitor aspek-aspek, baik sosial maupun fisik, konteks tempat bergerak dirinya sendiri. Pengertian rasionalisasi tindakan ialah bahwa para aktor juga secara rutin dan kebanyakan tanpa banyak percekocokan mempertahankan suatu "pemahaman teoritis" yang terus-menerus atas dasar-dasar aktivitasnya. Pemahaman seperti ini hendaknya tidak disamakan dengan pemberian alasan-alasan secara diskursif atas butir-butir perilaku tertentu, maupun tidak disamakan dengan kemampuan melakukan spesifikasi terhadap alasan-alasan seperti itu secara diskursif. Namun demikian, agen-agen lain yang cakap mengharapkan dan merupakan kriteria kompetensi yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari bahwa aktor biasanya akan mampu menjelaskan sebagian besar atas apa yang mereka lakukan, jika memang maksud-maksud dan alasan-alasan yang menurut para pengamat normalnya hanya diberikan oleh aktor-aktor awam baik motivasi tindakan ketika beberapa perilaku

tertentu itu membingungkan atau bila mengalami kesesatan atau fraktur dalam kompetensi yang kenyataannya mungkin memang kompetensi yang diinginkan.

Jadi individu biasanya tidak akan menanyai orang lain mengapa melakukan aktivitas yang sifatnya konvensional pada kelompok atau budaya yang ia sendiri menjadi anggotanya. Individu biasanya juga tidak meminta penjelasan bila terjadi kesesatan yang nampak mustahil bisa dipertanggungjawabkan oleh agen bersangkutan. Namun jika Freud memang benar, fenomena seperti itu mungkin memiliki dasar pemikiran tertentu, kendati jarang disadari baik oleh pelaku seperti itu atau orang lain yang menyaksikannya (Giddens, 2011).

Pembedaan antara monitoring refleksif dan rasionalisasi tindakan dengan motivasinya mengacu pada keinginan-keinginan yang mengarahkannya. Akan tetapi, motivasi tidaklah secara langsung dibatasi oleh kesinambungan tindakan-tindakan seperti halnya rasionalisasi atau monitoring refleksifnya. Motivasi mengacu pada potensi tindakan bukan pada model pelaksanaan tindakan secara terus menerus oleh agen yang bersangkutan. Motif-motif cenderung memiliki perolehan langsung atas tindakan hanya dalam keadaan-keadaan yang relatif tak biasa, situasi-situasi yang dalam beberapa sisi terputus dari rutinitas. Kebanyakan motif-motif memasok seluruh rencana atau program 'proyek-proyek' dalam istilah Schutz, tempat dilakukannya gugusan perilaku. Kebanyakan perilaku sehari-hari tidak dimotivasi

secara langsung (Giddens, 2011).

Bagi Giddens setiap manusia merupakan agen yang bertujuan (*purposive agent*) karena sebagai individu, ia memiliki dua kecenderungan, yakni memiliki alasan-alasan untuk tindakan-tindakannya dan kemudian mengelaborasi alasan-alasan ini secara terus menerus sebagai bertujuan, bermaksud dan bermotif (Susilo, 2008: 413). Agensi mengacu pada perbuatan, kemampuan atau tindakan otonom untuk melakukan apa pun.

## **2. Struktur dan Strukturasi**

Struktur sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi tindakan manusia, sebagai sumber yang mengekang kekuasaan subjek yang disusun secara mandiri. Sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam pemikiran strukturalis dan post-strukturalis, gagasan struktur ternyata lebih menarik. Dalam hal ini struktur secara khas dianggap bukan sebagai pembuat pola kehadiran seorang melainkan sebagai titiksimpang antara kehadiran dan ketidakhadiran. Kode-kode dasar harus disimpulkan dari manifestasi-manifestasi yang merekat (Giddens, 2011) sehingga batas-batas antara keduanya bisa diidentifikasi dengan jelas pada pembahasan selanjutnya.

Struktur merupakan urutan sesungguhnya dari suatu hubungan transformatif yang berarti bahwa sistem sosial, sebagai praktik sosial

yang direproduksi tidak memiliki struktur namun memperlihatkan sifat-sifat struktural. Ia menunjukkan bahwa struktur itu ada, sebagaimana keberadaan ruang dan waktu. Sifat-sifat struktural ini hanya muncul di dalam berbagai tindakan instan serta menjadi jejak-jejak memori yang memberi petunjuk akan perilaku agen-agen manusia yang telah banyak memiliki pengetahuan. Pada gilirannya, bisa dianggap bahwa sifat-sifat struktural tersebut sebagai sesuatu yang secara hirarki diorganisasikan berdasarkan luasnya ruang dan waktu tempat pengorganisasian tindakan-tindakan tersebut secara rekursif. Sifat-sifat struktural yang muncul dalam sebuah totalitas reproduksi sosial demikian menurut Giddens disebut sebagai prinsip-prinsip struktural. Praktek-praktek sosial yang memiliki perluasan ruang waktu terbesar dalam totalitas seperti itu bisa disebut sebagai institusi.

Anggap saja aturan-aturan kehidupan sosial sebagai teknik-teknik atau prosedur-prosedur yang bisa digeneralisasikan dan diterapkan dalam pembuatan atau reproduksi praktek-praktek sosial. Aturan-aturan yang dirumuskan yang diberi ekspresi verbal sebagai kanon hukum, aturan-aturan birokratis, aturan-aturan permainan dan sebagainya merupakan kodifikasi intepretasi atas aturan-aturan bukannya aturan-aturan itu sendiri. Aturan-aturan tersebut hendaknya tidak dianggap sebagai sebuah penggambaran umum melainkan sebagai jenis-jenis khusus yang dirumuskan, berdasarkan formulasi lahirnya, yang terwujud dalam berbagai kualitas khusus (Giddens,2011).

Sejauh ini pertimbangan-pertimbangan tersebut hanya menawarkan pendekatan awal pada persoalan itu. Bagaimana kaitan rumus dengan praktek-praktek yang dijakankan aktor-aktor sosial dan jenis rumus apa yang paling menyedot perhatian dalam mencapai tujuan-tujuan umum analisis sosial? Tentang pertanyaan di atas dapat dikatakan bahwa kesadaran atas aturan-aturan sosial yang diungkapkan dulu dan paling banyak dalam kesadaran praktis, merupakan inti 'jangkauan pengetahuan' (*knowledge ability*) yang terutama memberikan karakter pada agen-agen manusia. Sebagai aktor-aktor sosial, seluruh manusia telah banyak dipelajari berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki diterapkannya dalam memproduksi dan mereproduksi perjumpaan-perjumpaan sosial sehari-hari. Kumpulan pengetahuan seperti itu sifatnya praktis bukannya teoritis.

Pengetahuan tentang prosedur atau penguasaan teknik-teknik melakukan aktivitas sosial dengan demikian bersifat metodologis. Aturan yang muncul dalam interaksi sosial menjadi pedoman yang digunakan agen-agen atau pelaku-pelaku untuk melakukan reproduksi hubungan-hubungan sosial yang melintasi batasan waktu dan ruang. Aturan muncul dengan ciri-ciri sebagai berikut: Aturan sering dipikirkan dalam hubungan dengan permainan atau sebagai konsep yang diformalkan. Bahkan ia diklasifikasikan sebagai bentuk hukum yang secara karakteristik menjadi pokok persoalan dari sebuah keragaman tentang permohonan yang sungguh-sungguh.

Aturan sering diperlakukan tunggal, seolah-olah ia dapat dihubungkan dengan contoh-contoh khusus atau bagian dari tindakan. Tetapi menjadi tidak benar jika dikenalkan dengan analogi pada beroperasinya kehidupan sosial, yang makna praktik-praktik dilanggengkan dalam kebersatuan dengan kerangka yang terorganisasi secara longgar.

Aturan tidak dapat dikonsepsikan lepas dari sumber daya, yang menunjukkan cara dengan jalan mana hubungan transformatif benar-benar bergabung dengan reproduksi dan produksi praktik-praktik sosial. Kemudian, sifat-sifat struktural menggambarkan bentuk dominasi dan kekuasaan.

Kemudian, perbedaan struktur sebagai istilah umum dengan struktur dalam pengertian jamak ialah keduanya berasal dari sifat struktural sistem sosial. Struktur mengacu tidak hanya pada aturan-aturan yang disiratkan dalam produksi dan reproduksi sistem-sistem sosial namun juga pada sumberdaya-sumberdaya. Ketika Giddens menjelaskan sumber daya, ia menyatakan bahwa individu menciptakan masyarakat dengan tidak sekedar melakukannya dengan cara yang sederhana, tetapi lebih dahulu menggambarkan sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.

Adapun tiga jenis sumber daya yang dimaksudkan ialah: (a) makna (sesuatu yang diketahui, stok pengetahuan, (b) moral (sistem nilai), dan (c) kekuasaan (pola-pola dominasi dan pembagian kepentingan. Sumber

daya juga terdiri atas dua hal yakni sumber daya *autoritatif* dan sumber daya *alokatif*. Sumber daya autoritatif diturunkan dari koordinasi aktivitas agen. Sumber daya alokatif merupakan lingkaran kontrol produk material atau tentang aspek dari dunia material.

Arti penting dalam pengertian struktur dapat dikatakan sebagai pelengkap penjelasan mengenai agen. Menurut Giddens struktur terkait dengan hal-hal berikut: Struktur merupakan sifat-sifat terstruktur yang mengikat ruang dan waktu dalam sistem sosial. Sifat-sifat ini mungkin menjadi praktik sosial yang sama terlihat berlangsung melebihi rentang ruang-waktu yang meminjamkan kepadanya dalam bentuk sistemik.

Struktur merupakan keteraturan yang sebenarnya dari hubungan transformatif, yang berarti sistem sosial karena praktik-praktik sosial yang tereproduksi tidak memiliki struktur, tetapi lebih menunjukkan sifat-sifat struktural dan keberadaan struktur itu sebagai kehadiran ruang dan waktu, hanya dalam penggambarannya seperti pada praktik-praktik sosial dan sebagai memori yang menemukan arah pada perilaku agen manusia yang dapat dikenali (Susilo, 2008: 417).

Dapat disimpulkan bahwa struktur didefinisikan sebagai sifat-sifat yang terstruktur (aturan dan sumber daya). Sifat-sifat yang memungkinkan praktik sosial serupa dapat dijelaskan untuk berlangsung di sepanjang ruang dan waktu dan kedua proses ini membuat bentuk-bentuk hubungan menjadi sistemik. Jadi, struktur hanya akan terwujud bila ada aturan dan sumber daya. Keduanya sangat penting untuk

mereproduksi sistem sosial. Karena itu struktur menjelma dalam ingatan orang yang memiliki banyak pengetahuan (Waters dan Jary dalam Susilo, 2008: 418).

Giddens menyatakan bahwa ada tiga gugus besar struktur. *Pertama*, struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. *Kedua*, struktur penguasaan atau dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang atau hal (ekonomi). *Ketiga*, struktur pembenaran (legitimasi) yang menyangkut skemata peraturannormatif yang terungkap dalam tata hukum.

### **3. Dualitas Struktur**

Menganalisis struktur sistem sosial berarti mengkaji mode-mode tempat diproduksi dan direproduksinya sistem-sistem seperti itu dalam interaksi yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas utama agen-agen di tempat tertentu yang menggunakan aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya dalam konteks tindakan yang beraneka ragam. Paling penting dalam gagasan strukturasi ialah dualitas struktur yang secara logis disiratkan dalam argument-argumen yang dikemukakan di atas. Pembentukan agen-agen dan struktur-struktur bukanlah dua gugus fenomena tertentu yang terpisah, yakni dualisme, melainkan menggambarkan suatu bentuk dualitas. Menurut gagasan dualitas struktur sifat-sifat struktural sistem sosial keduanya merupakan media dan hasil praktek-praktek yang mereka organisasikan secara rekursif.

Struktur tidaklah bersifat eksternal bagi individu-individu, sebagai jejak-jejak memori dan seperi yang diwujudkan dalam praktek-praktek sosial, namun dalam pengertian tertentu ia lebih bersifat 'internal' bukannya eksternal bagi aktivitas-aktivitasnya dalam pengertian Durkheim dengan fakta sosial. Struktur tidak disamakan dengan kekangan namun selalu mengekang dan membebaskan. Tentu saja hal ini tidak mencegah sifat-sifat terstruktur sistem sosial untuk melebar masuk ke dalam ruang dan waktu di luar kendali aktor-aktor individu, juga tidak ada kompromi terhadap kemungkinan-kemungkinan bahwa teori sistem sosial para aktor dibantu ditetapkan kembali dalam aktivitas-aktivitasnya bisa merealisasikan sistem-sistem itu. Reifikasi hubungan-hubungan sosial atau naturalisasi diskursif keadaan-keadaan yang bergantung secara historis pada produk-produk tindakan manusia merupakan salah satu dimensi utama ideologi dalam kehidupan sosial(Giddens, 2011: 32).

Dualitas struktur selalu merupakan dasar utama kesinambungan dalam reproduksi sosial dalam ruang dan waktu. Pada gilirannya hal ini mensyaratkan monitoring reflektif agen-agen dan sebagaimana yang ada di dalam aktivitas sosial sehari-hari, namun jangkauan pengetahuan manusia itu selalu terbatas. Arus suatu tindakan senantiasa menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan oleh aktor-aktor dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan itu mungkin juga membentuk kondisi-kondisi tindakan yang tak diakui dalam suatu umpan balik.

Ada dua pendekatan yang kontras bertentangan dalam melihat realitas sosial, pertama, pendekatan yang terlalu menekankan pada dominasi struktur dan kekuatan sosial (tradisi fungsionalisme parsonian yang cenderung ke obyektivisme. Kedua, pendekatan yang terlalu menekankan pada individu (tradisi hermeneutik yang cenderung ke subyektivisme). Kerangka pemikiran inilah yang peneliti gunakan untuk melihat konteks petani jagung dan relasinya dengan pemerintah dalam program pembangunan pertanian di Kabupaten Gorontalo.

#### **E. Motif Berprestasi**

Mc Clelland mengemukakan enam karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, yaitu:

1. Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi,
2. Berani mengambil dan memikul resiko,
3. Memiliki tujuan realistik,
4. Memilikirencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan,
5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang dilakukan,
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.(Mangkunegara, 2005).

Dalam Mc.Clelland's Achievement Motivation Theory atau teori motivasi prestasi, McClelland mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan

dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia.

Teori motivasi prestasi ini memfokuskan pada tiga kebutuhan

yaitu:

1. Kebutuhan akan Prestasi
2. Kebutuhan Kekuasaan
3. Kebutuhan Afiliasi.

Berikut ini penjelasan tentang tiga kebutuhan dalam teori motivasi prestasi dari Mc.Clelland's:

**a. Kebutuhan akan Prestasi**

Kebutuhan akan prestasi adalah dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. Ciri-ciri inidividu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah.

**b. Kebutuhan akan Kekuasaan**

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari

individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain.

McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan.

### **c. Kebutuhan untuk Berafiliasi**

Kebutuhan akan afiliasi atau bersahabat adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi.

McClelland mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kombinasi karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja atau mengelola organisasi.

Karakteristik dan sikap motivasi prestasi menurut McClelland adalah:

- a. Pencapaian adalah lebih penting daripada materi.
- b. Mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar daripada menerima pujian atau pengakuan.
- c. Umpan balik sangat penting, karena merupakan ukuran sukses (umpan balik yang diandalkan, kuantitatif dan faktual). (Robbins, 2001).

### **F. Kerangka Konseptual**

Partisipasi sosial mengindikasikan keterlibatan individu atau

komunitas dalam sebuah program atau kegiatan. Dalam keterlibatan tersebut unsur kesadaran berpengaruh besar karena sebuah kegiatan atau program dapat ditujukan untuk kepentingan mereka semua yang terlibat. Dalam pengertian lain, partisipasi melibatkan unsur pikiran, emosi, dan keterampilan individu dalam menuangkan gagasan demi keberhasilan kegiatan yang mereka sendiri menikmati hasilnya saat berhasil. Dengan demikian, bila keterlibatan sosial tidak mengikutsertakan unsur psikis di atas dapat disebut bukanlah partisipasi sosial.

Aspek-aspek internal (emosi dan pikiran) tersebut dijelaskan dalam teori “Motif Berprestasi” sebagai unsur-unsur individu yang menjadi daya dorong seseorang melakukan sesuatu. Hal tersebut tertuang dalam 3 kebutuhan utama yaitu, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan terhadap kekuasaan. Ketiga hal tersebut juga termasuk dalam partisipasi sosial petani jagung dalam meningkatkan program ekspor jagung.

Di dalam sebuah partisipasi sosial yang ditujukan untuk mencapai kesuksesan bersama, tentulah dapat berlangsung bila disertai dengan ikatan-ikatan emosional yang dapat disebut sebagai solidaritas sosial di antara mereka yang terlibat. Di dalamnya mengandung rasa senasib, sepejuangan, yang dapat menjadi faktor pendorong hingga penggerak individu mencapai tujuan kegiatan atau program.

Pada saat yang sama, ada hal lain yang hadir bersamaan dengan

solidaritas sosial yang dinamakan modal sosial. Di dalam sebuah komunitas atau kelompok, kekompakan dan kerjasama sangat diperlukan. Hal ini dapat terjadi bila ada modal sosial yang mengawal solidaritas sosial tersebut. Modal sosial yang dimaksud meliputi unsur-unsur kepercayaan, nilai, dan norma. Artinya, sebuah kerjasama menjadi memiliki kekuatan bila individunya saling percaya, memiliki nilai dan norma yang sama.

Sebuah program dapat dilaksanakan hingga berhasil bila semua anggota terlibat dan berpartisipasi. Partisipasi tersebut harus dilakukan secara sadar, melibatkan emosi para anggota sehingga melahirkan solidaritas sosial yang di dalamnya tertanam rasa saling percaya (modal sosial). ketika langkah-langkah tersebut dijadikan kebiasaan (dilakukan secara berulang-ulang) oleh para anggota maka menjadilah ia sebuah struktur dan tertanam dalam pikiran dan perilaku mereka (aktor).

Dalam perspektif Teori Strukturasi, Keberhasilan pemerintah melakukan ekspor jagung mengisyaratkan adanya tindakan-tindakan para petani yang telah tertata rapi dan dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan atau terpola. Misalnya, partisipasi sosial para petani telah menjadi kebiasaan mereka. Semua petani jagung terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pemecahan masalah dan pemberian solusi atas problem yang mereka hadapi dalam bertani sampai berhasil melakukan ekspor jagung.

### Bagan Alur Dan Kerangka Konseptual

